

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Edisi Keempat

Buku ini merupakan rekonstruksi pikiran dan cita-cita para pendiri negara di bidang ekonomi. Penelusuran kami menunjukkan bahwa pemikiran dasar tentang ekonomi Indonesia telah diletakkan oleh Bung Hatta sejak tahun 1932. Dalam pidatonya, "Ke Arah Indonesia Merdeka" (1932), Bung Hatta menyatakan: "Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat... Inilah arti kedaulatan rakyat. Tidak saja dalam hal politik melainkan juga dalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi". Dari pandangan yang sangat mendasar tersebut, jelas tergambar betapa mekanisme pengaturan negara --termasuk di bidang ekonomi-- harus diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat. Bagi Bung Hatta, hal inilah arti sesungguhnya dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Oleh karena itu, asas, kaidah, arah dan haluan perekonomian bangsa ini harus diputuskan oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui UUD 1945 dan GBHN.

Kehadiran buku ini semoga dapat memperkaya khazanah pemikiran ekonomi, Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya, bahwa Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) adalah "cara pandang sendiri" dalam ekonomi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dan diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. SEP --sebagaimana dimaknai para pendiri NKRI-- merupakan "sistem sendiri", berhasil direkonstruksi dalam buku ini dengan pelacakan historis, dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu dengan tiga tahap pembahasan: asal-usul, penalaran, serta arah haluan dan penerapannya. Pemikiran dan cita-cita para pendiri negara di bidang ekonomi tersebut kiranya masih relevan dan dapat menjadi solusi bagi masalah bangsa dalam menghadapi perkembangan jaman dan tantangan globalisasi.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwirangung No. 112
Kel. Leuwirangung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telepon 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id



RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
EKONOMI



Harga P. Jawa Rp99.000,-



SISTEM EKONOMI PANCASILA

Edisi Keempat

Subiako Tjakrawerdaja | Soenarto Soedarno | P. Setia Lenggono
Budhi Purwandaya | Muhamad Karim | Lestari Agusalim



SISTEM EKONOMI PANCASILA

Edisi Keempat

Subiako Tjakrawerdaja | Soenarto Soedarno | P. Setia Lenggono
Budhi Purwandaya | Muhamad Karim | Lestari Agusalim

KATA PENGANTAR
Jendral TNI (Purn.) Try Sutrisno
(Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode 1993-1998)

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Edisi Keempat

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Edisi Keempat

Subiako Tjakrawerdaja | Soenarto Soedarno | P. Setia Lenggono
Budhi Purwandaya | Muhamad Karim | Lestari Agusalim

KATA PENGANTAR

Jendral TNI (Purn.) Try Sutrisno

(Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode 1993-1998)



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Subiakto Tjakrawerdaja

Sistem Ekonomi Pancasila/Subiakto Tjakrawerdaja, dkk.
—Ed. 4.—Cet. 7.—Depok: Rajawali Pers, 2021.
xxii, 276 hlm., 23 cm
Bibliografi: hlm. 251
ISBN 978-623-231-832-8

1. Indonesia—Politik ekonomi.

I. Judul

338.959 8

Hak cipta 2017, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2017.1710 RAJ

Subiakto Tjakrawerdaja, dkk.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Cetakan ke-1, Maret 2017
Cetakan ke-2, Mei 2017
Cetakan ke-3 (Edisi Kedua), Januari 2019
Cetakan ke-4 (Edisi Kedua), Mei 2019
Cetakan ke-5 (Edisi Ketiga), Maret 2020
Cetakan ke-6 (Edisi Ketiga), Juli 2020
Cetakan ke-7 (Edisi Keempat), April 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Setter oleh Jaenudin

Desain cover oleh Muhamad Iqbal

Editor oleh Mohamad Zaelani

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon: (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

[Http://www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

MEMAHAMI PANCASILA SECARA TERPADU

JENDRAL TNI (PURN.) TRY SUTRISNO

(WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE-6 PERIODE 1993-1998)

Dua Proklamator Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sejak masa pergerakan nasional berusaha mencari landasan kehidupan berbangsa yang bebas dari penjajahan. Bangsa asing datang dan menjajah Indonesia untuk mencari rezeki dengan melakukan eksploitasi ekonomi, dominasi politik dan hegemoni budaya. Untuk itu bangsa Indonesia harus bersatu dan berjuang bersama dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Dalam pleidoi yang ditulis tahun 1928 dengan judul “Indonesia Merdeka” Bung Hatta tidak hanya bicara tentang tujuan perjuangan politik, tetapi juga eksploitasi ekonomi. Demikian juga dalam tulisan beliau “Menuju Indonesia Merdeka” menguraikan tatanan kehidupan sosial politik ekonomi yang perlu diperjuangkan bersama. Hal yang sama juga diungkapkan Ir. Soekarno dalam pleidoi “Indonesia Menggugat” tentang politik penjajahan yang melakukan eksploitasi ekonomi. Bahkan dalam buku “Mencapai Indonesia Merdeka” Bung Karno menjelaskan tentang Demokrasi Politik yang tidak boleh dipisahkan dengan Demokrasi Ekonomi dengan konsep “Sosio-Demokrasi”.

Dua proklamator secara tegas menyatakan agar bangsa Indonesia tidak meniru demokrasi liberal di negara kapitalis yang memisahkan sistem politik dan sistem ekonomi. Dan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 memberikan basis dan orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat terkait dengan pencapaian visi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pembangunan nasional sebagai bagian dari pengalaman Pancasila harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, termasuk tidak memisahkan sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila. Upaya mengembangkan pemikiran (dan kebijakan) politik dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terus dilakukan oleh Cendekiawan Indonesia.

Salah satu kelompok cendikiawan yang *concern* dengan pemikiran ini adalah Bapak Subiakto Tjakrawerdaja dan kawan-kawan dari Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP), Universitas Trilogi Jakarta yang telah menerbitkan buku Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) dan Sistem Demokrasi Pancasila (SDP). Baik buku SEP maupun SDP tersebut telah banyak dikaji di berbagai forum serta mendapatkan respons yang positif dari pelbagai kalangan.

Terbitnya (kembali) buku Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila layak kita apresiasi karena dapat memberikan penjelasan sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Semoga buku ini dapat memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Jakarta 15 Maret 2021

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga buku SEP Edisi Keempat (cetakan ke-7) kembali berhasil kami terbitkan. Buku SEP yang terbit perdana pada tahun 2017, terus kami sempurnakan agar para pembacanya dapat dengan lebih mudah dan jelas mengikuti rekonstruksi gagasan para pendiri negara yang kami lakukan. Agar dapat diikuti dengan baik, rekonstruksi gagasan para pendiri negara, kami lakukan melalui pendekatan kesisteman.. Dalam buku SEP edisi keempat, cetakan ke-7 ini dilakukan beberapa penyempurnaan substansi agar unsur-unsur pemikiran para pendiri negara yang kami rumuskan melalui pendekatan kesisteman bertambah jelas. Dalam proses penyempurnaan dilakukan upaya untuk memperjelas rangkaian pemikiran yang saling menjiwai dari satu sub Bab dengan sub Bab berikutnya dalam satu Bab dan dari satu Bab dengan Bab berikutnya dalam satu Bagian serta dari satu Bagian dengan Bagian berikutnya dari keseluruhan buku. Dengan demikian penyempurnaan ini akan dapat memberi pemahaman tentang SEP secara lebih jelas dan mudah

sebagai suatu kesatuan pemikiran sistim perekonomian nasional NKRI yang utuh dan menyeluruh.

Dengan demikian gagasan para pendiri negara yang telah berhasil menggali Pancasila sebagai “pandangan dunia” yang berisi nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka sampai kepada SEP yang ingin diterapkan sebagai landasan pembangunan nasional dapat terus didalami agar bangsa Indonesia yakin akan kebenarannya, sehingga tidak akan terombang-ambing dalam arus globalisasi. Lebih-lebih dewasa ini sudah mulai terjadi kecenderungan pemusatan ideologi dunia menjadi ideologi tunggal liberalis-kapitalis menyusul tumbangnyanya ideologi fasisme dan komunisme. Dalam proses penyempurnaan buku ini setiap kali dilakukan pencetakan ulang, selalu ada penyempurnaan, sejalan dengan hasil yang diperoleh dari upaya pendalaman dan perluasan pandangan para pendiri negara yang kami lakukan. Edisi Keempat ini merupakan penyempurnaan dari Cetakan Ke-1 dan Ke-2 (Edisi Pertama) dan Cetakan Ke-3 dan Ke-4 (Edisi Kedua), serta Cetakan ke-5 dan Ke-6 (Edisi ketiga). Berbagai kesalahan yang terjadi pada cetakan-cetakan (edisi) sebelumnya, seperti kesalahan ketik, kekeliruan ejaan, dan kekurangan dalam pengkalimatan, juga kami perbaiki.

Dalam proses penyempurnaan buku ini telah dilakukan serangkaian kegiatan ilmiah, seperti lokakarya, diskusi pakar, grup diskusi terfokus, seminar nasional, dan bedah materi yang melibatkan berbagai pihak terutama yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan dan menyebarkan pemikiran tentang SEP. Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut penulis tidak hanya mendapatkan apresiasi tetapi juga kritikan konstruktif dari berbagai pihak yang datang dari kalangan akademisi, praktisi, jurnalis, agamawan, dan politisi guna mempertajam substansi buku, sehingga dalam *SEP* Edisi Keempat ini dapat dilakukan berbagai penyempurnaan.

Kehadiran buku *SEP* Edisi Keempat ini diharapkan akan lebih memenuhi keinginan masyarakat yang mulai melihat kembali pada

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang diamanatkan oleh para pendiri negara dan menjadi “oase” bagi bangsa Indonesia di tengah masifnya liberalisasi ekonomi yang merasuk pada semua aspek kehidupan. Buku ini juga menandai keberadaan SEP yang beberapa tahun silam masih dalam tataran wacana. SEP merupakan cara pandang yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan ekonomi guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Selain itu, kehadiran SEP Edisi Keempat ini terasa bertambah penting karena pada saat yang bersamaan juga diterbitkan buku Sistem Demokrasi Pancasila (SDP) cetakan kedua yang memuat konsepsi Sistem Politik Pancasila (SPP) yang merupakan paduan dari SEP. Terbitnya kedua buku tersebut diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang sistem ketatanegaraan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, intelektual, dan praktisi yang telah menyumbangkan pemikiran dan gagasannya dalam diskusi dan dialog maupun seminar yang diadakan dalam rangka menyempurnakan substansi buku ini. Di antaranya adalah Prof. Dr. Emil Salim, Dr. Yudi Latief, Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Prof. Dr. Kaelan, R.M. Ananda B. Kusuma, S.H., Dr. Sapuan, Prof. Dr. Bambang Purwoko, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dan Ahmad Kartohadiprodjo. Secara khusus perlu disampaikan penghargaan yang tinggi atas dedikasi yang luar biasa dari Dr. (Alm.) Daoed Joesoef dan Prof. Dr. (Alm.) M. Dawam Rahardjo yang di akhir masa hidupnya masih sempat melakukan sesi diskusi dalam rangka mempertajam sejumlah substansi materi buku ini.

Tidak kalah pentingnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan pula kepada Prof. Dr. Munawar Ismail, Prof. Dr. Erani Yustika, dan Dr. Dwi Budi Santosa. Kepada Dr. Fuad Bawazier

dan Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., kami sampaikan rasa terima kasih atas jasanya dalam memberikan sentuhan akhir perbaikan buku ini.

Ucapan terima kasih, secara khusus, juga perlu kami sampaikan kepada Prof. Dr. Haryono Suyono (Pembina Universitas Trilogi) yang selalu memberikan semangat untuk penyusunan buku ini.

Berikutnya kami juga perlu memberikan apresiasi atas terbentuknya Konsorsium Sistem Ekonomi Pancasila (Kon-SEP), sebagai komitmen tujuh universitas untuk membumikan gagasan SEP, yang telah dideklarasikan dalam *Semiloka Sistem Ekonomi Pancasila* bertema “Mewujudkan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional” pada 14-15 September 2016 di Jakarta. Untuk itu, para penulis mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Dr. Ilah Saillah (kala itu Koordinator Kopertis Wilayah III) dan Prof. Dr. Bomer Pasaribu (Dubes Denmark dan Lithuania 2011-2016) yang telah berkenan menjadi pembicara seminar. Juga, dedikasi para peserta lokakarya: Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. dan Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. (Universitas Negeri Semarang); Dr. Akhmad Daerobi, M.Si. dan Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D. (Universitas Sebelas Maret); Dr. Yadi Ruyadi, M.Si. dan Dr. Cecep Dharmawan, S.IP, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia); Dr. Heri Nugraha, S.E., M.Si. (Institut Koperasi Indonesia); Dr. Sri Widyastuti, Dr. Sonny Soeharso, Drs. Murthada Sinuraya, M.M. (Universitas Pancasila); Dr. Dadan Anugrah, M.Si., Dr. Syahrial Syarbani, M.A, Agus Arijanto, S.E., M.Si. dan H. Ghazaly Ama La Nora, S.IP, M.Si. (Universitas Mercu Buana) yang telah dengan tekun membaca ulang dan memberikan koreksi konstruktif terhadap *SEP*.

Selanjutnya kami ingin memberikan ucapan terima kasih pada sejumlah pihak di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-Universitas Gadjah Mada (UGM), Pusat Studi Pancasila UGM, Mubyarto Institute Yogyakarta, serta Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Pusat Penelitian Politik dan Pengembangan Masyarakat (P3M) Pascasarjana Universitas Nasional, *Political Economics and Policy Studies* (PEPS) dan

Aliansi Kebangsaan yang secara langsung maupun tidak langsung sering terlibat dalam berbagai diskusi yang mencerahkan terkait dengan membumikan kembali gagasan Pancasila, yang sangat penting artinya bagi pematangan buku ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga perlu disampaikan pada kolega kami, Prof. Dr. Ir. Asep Saefudin (Rektor Universitas Trilogi Jakarta, Periode 2013-2017), Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro (Rektor Universitas Trilogi, Periode 2019-2023), Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho (Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta, kurun 2010-2018) dan Prof. Dr. Wahono Sumaryono (Rektor Universitas Pancasila), Prof. Dr. Ravik Karsidi (Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, kurun 2011-2019), Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. (Rektor Universitas Negeri Semarang), Dr. (HC) Burhanuddin Abdullah, M.A, (Rektor Institut Koperasi Indonesia), Prof. (Alm.) Furqon, M.A., Ph.D., (mantan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung) dan Dr. Ir. H. Achmad Iqbal, M.Si., (Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Periode 2014-2018) yang begitu akomodatif dalam mendukung terbentuknya Kon-SEP –suatu wadah yang diharapkan menjadi penggerak pelaksanaan gagasan SEP di dalam kampus.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi dan karya intelektual, tetapi juga menjadi materi ajar di perguruan tinggi. Karena itu dalam edisi empat (cetakan ke-7) ini kami upayakan untuk menggunakan gaya bahasa yang sederhana, sehingga mudah dicerna. Penyajiannya pun kami upayakan dengan lebih ilmiah. Selain itu, buku ini diharapkan memberikan rangsangan berpikir konstruktif bagi mereka yang berminat mengembangkan sistem dan ilmu ekonomi yang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila.

Terima kasih.
Jakarta, April 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Memahami Pancasila Secara Terpadu Jendral Tni (Purn.) Try Sutrisno (Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode 1993-1998)	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
PROLOG	1
BAGIAN 1	
ASAL-USUL SEP	7
BAB 1 PAHAM KEKELUARGAAN DAN PANCASILA	11
A. Paham Kekeluargaan	11
B. Pancasila Dasar Negara Indonesia Merdeka	31

BAB 2	KEBANGKITAN BANGSA DAN NEGARA KEKELUARGAAN	41
	A. Kebangkitan Bangsa	41
	B. NKRI Negara Kekeluargaan	51
	C. Sistem Demokrasi Pancasila	61
BAGIAN 2		
	PENALARAN SISTEM EKONOMI PANCASILA	91
BAB 3	SISTEM EKONOMI	95
	A. Arti dan Peran Sistem Ekonomi	96
	B. Unsur-unsur Sistem Ekonomi	98
	C. Susunan Sistem Ekonomi	104
BAB 4	PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI PANCASILA	107
	A. Pemikiran Bung Hatta	107
	B. Pandangan Wilopo	111
	C. Pemikiran Emil Salim	113
	D. Pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo	115
	E. Pemikiran Mubyarto	116
	F. Pemikiran Boediono	116
	G. Pandangan M. Dawam Rahardjo	117
	H. Pandangan Sri-Edi Swasono	119
	I. Pandangan Sritua Arief	121
	J. Pemikiran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia	121
	K. Pemikiran Subiakto Tjakrawerdaja	124
	L. Pemikiran Prof. Munawar Ismail, dkk.	129
BAB 5	SISTEM EKONOMI PANCASILA	135
	A. Ciri-Ciri Pokok Sistem Ekonomi Pancasila	139

B. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila	155
C. Kesejahteraan Sosial	164

BAGIAN 3

ARAH DAN HALUAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL INDONESIA	169
---	------------

BAB 6 SEKTOR PERINDUSTRIAN 181

A. Kebijakan Pembangunan Perindustrian Nasional	182
B. Strategi Pembangunan Perindustrian Nasional	183
C. Pola Tata Peran Pelaku Ekonomi (PTPPE) dalam Pembangunan Perindustrian	185

BAB 7 SEKTOR PERDAGANGAN 195

A. Kebijakan Pembangunan Perdagangan Nasional	195
B. Strategi Pembangunan Sektor Perdagangan Nasional	200
C. Pola Tata Peran Pelaku Ekonomi (PTPPE) dalam Pembangunan Perdagangan Nasional	202

BAB 8 SEKTOR KEUANGAN 207

A. Kebijakan Pembangunan Sektor Keuangan	208
B. Strategi Pembangunan Sektor Keuangan	211
C. Pelaku dalam Sektor Keuangan Nasional	213

BAB 9 SEKTOR FISKAL 219

A. Kebijakan Pembangunan Sektor Fiskal	220
B. Strategi Pembangunan Sektor Fiskal	222
C. Keterkaitan Sektor Keuangan dan Sektor Fiskal	223

BAB 10 SEKTOR JAMINAN SOSIAL 225

A. Kebijakan Pembangunan Sektor Jaminan Sosial	226
B. Strategi Pembangunan Sektor Jaminan Sosial	228

BAB 11 PENERAPAN SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA	231
A. Pembangunan Nasional Pemerintah Orde Lama	232
B. Pembangunan Nasional Pemerintah Orde Baru	234
C. Pembangunan Nasional Pemerintahan Reformasi	241
EPILOG	243
DAFTAR PUSTAKA	251
INDEKS	267
BIODATA PENULIS	273

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tipe-Tipe Rezim Hak Kepemilikan Berdasarkan Pemilik, Hak dan Kewajiban	102
Tabel 4.1	Perbedaan Paradigma Ekonomi Liberalisme dan Demokrasi Ekonomi	120
Tabel 6.1	Pola Tata Peran Pelaku Ekonomi (PTPPE) dalam SEP	191

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Migrasi Penutur Austronesia	13
Gambar 1.2.	Hirarkis Piramidal Pancasila	38
Gambar 2.1	Skema Struktur Lembaga-Lembaga Negara	88
Gambar 3.1	Susunan Sistem Ekonomi	105

PROLOG

Setiap bangsa dan negara memiliki pandangan hidup dan sistem kehidupan masing-masing sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan hidup dan sistem kehidupan tersebut tidak sama, karena dilatarbelakangi oleh perbedaan geografis, iklim, akar budaya, dan sistem sosial ekonomi, yang berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Perbedaan pandangan hidup dan sistem kehidupan tersebut pada akhirnya mengkrystal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan, yang pada gilirannya membentuk sebuah peradaban tersendiri yang khas dan menunjukkan jati dirinya. Kekhasan peradaban tadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor internal (budaya, etnik, sistem sosial, dan geografi) yang bersifat orisinal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dengan beragam sistem filsafat, sistem sosial, sistem ekonomi, dan kemajuan zaman. Pandangan hidup dan sistem kehidupan inilah yang diyakini oleh setiap bangsa sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara untuk menjaga kelangsungan eksistensi negara yang bersangkutan.

Walaupun dewasa ini, sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan majunya teknologi modern, berkembang pandangan –yang diawali dari pandangan Daniel Bell dalam bukunya “*The End of Ideology*”– bahwa ideologi sudah sampai pada akhir kematiannya, dan dianggap tidak lagi relevan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih. Bahkan menurut Sutrisno (2006), dewasa ini berkembang budaya yang terus menguat -sejalan dengan pandangan Bell- bahwa ideologi telah bergeser ke arah statusnya yang *exhausted*, sehingga orang-orang pun cenderung bersikap dan berperilaku pragmatis.

Kita merasa bersyukur dan berterima kasih bahwa para pendiri negara yang bijak bestari ketika membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah menetapkan dasar-Negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila yang digali dari akar-akar budaya (adat), sistem sosial, serta sistem ekonomi yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun serta melekat dalam falsafah hidup setiap individu manusia atau pun komunitas masyarakat Indonesia yang mengkristal menjadi paham yang otentik dan khas Indonesia yaitu paham kekeluargaan. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang menyatakan bahwa beliau hanyalah sebagai perumus dan bukan pencipta Pancasila. Sebab, Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia. Pancasila telah lama tergrurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia yang akan memperkokoh eksistensi bangsa Indonesia.

Setelah para pendiri negara berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, *Weltanschauung* atau *Staat Grund Norm*, maka mereka mulai merancang konstitusi, *Staat Recht Norm* atau Undang Undang Dasar yang akan menjadi dasar hukum Negara yang akan mereka dirikan. Konstitusi yang mereka rancang tadi haruslah merupakan Undang Undang Dasar yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara tersebut. Sesuai dengan hasil Sidang BPUPK, maka negara yang akan

mereka bangun harus berupa negara kesatuan yang demokratis dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Bagi para pendiri negara, yang dimaksud dengan demokrasi bukanlah hanya berarti demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar yang mereka rancang harus mengamanatkan bahwa negara yang mereka dirikan itu adalah negara kesatuan yang demokratis dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Karena itulah kemudian dalam menata kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, para pendiri negara menyadari sepenuhnya pentingnya menetapkan suatu pedoman melalui suatu sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila. Hanya dengan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan pada Pancasila inilah, bangsa Indonesia yang majemuk akan mampu merawat dan menjaga kesatuan dan persatuannya dalam menghadapi benturan peradaban yang telah mulai dirasakan terjadi saat ini.

Kita juga merasa bersyukur bahwa para pendiri negara telah merancang sistem ketatanegaraan NKRI yang berlandaskan Pancasila yang disebut dengan Sistem Demokrasi Pancasila (SDP) yang di dalamnya mengandung Sistem Demokrasi Politik dan Sistem Demokrasi Ekonomi. SDP selanjutnya secara utuh dan menyeluruh terurai dalam UUD 1945.

Karena berbagai sebab, para pendiri negara tidak sempat menyiapkan konsepsi SDP dalam suatu naskah yang utuh dan menyeluruh yang berbentuk kesisteman. Untuk itu penulisan buku ini merupakan upaya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran para pendiri negara secara ilmiah tentang demokrasi ekonomi melalui pendekatan kesisteman yang kami sebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang merupakan bagian integral dari SDP.

Gagasan perlunya kajian SEP sesungguhnya telah lama tumbuh di kalangan para ahli ekonomi, akademisi dan praktisi. Namun untuk pertama kalinya gagasan tersebut baru disampaikan oleh Emil Salim

pada tahun 1966 dan selanjutnya dikembangkan oleh Mubyarto melalui berbagai seminar dan diskusi-diskusi tentang SEP, dalam kurun waktu yang cukup panjang sehingga telah dapat menambah wawasan dan memperkaya pemikiran SEP. Namun, sebelum dapat membangun penalaran SEP secara utuh dan menyeluruh, beliau telah tiada.

Pandangan tentang SEP juga tidak sepi dari kritik dan muncul kritikus ekonomi Pancasila, seperti Dr. Arief Budiman, Prof. Sarbini Sumawinata, William R. Liddle dan McCawley (1982).

Nugroho (2004) dengan sangat cermat merangkum perdebatan akademis tersebut, menurutnya, jika menyimak riwayatnya yang cukup panjang, ditambah dengan sejumlah polemik yang pernah menyertainya, gagasan ekonomi Pancasila sebenarnya bisa dikatakan telah “memiliki sejarah sendiri” dan merupakan salah satu *milestone* dari pemikiran kaum intelektual Indonesia. Meskipun masih merupakan gagasan fragmentaris yang belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh, berbagai hasil kajian tentang SEP yang diprakarsai oleh Mubyarto, serta kritik yang disampaikan oleh para ahli telah memberikan pijakan yang kokoh untuk merumuskan SEP dalam rangkaian penalaran secara lebih utuh dan menyeluruh dan mengembangkannya sebagai sistem ekonomi aplikatif dengan perspektif Indonesia. Dalam konteks inilah, Universitas Trilogi yang memiliki Visi “Menjadi Universitas yang Inovatif dengan Mengembangkan Keteknososioprenuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, merasa berkepentingan untuk ikut berkontribusi, menyumbangkan gagasan dan pemikiran terkait dengan pengembangan SEP. Khususnya, dalam pengembangan materi pengajaran berupa buku bahan ajar sehingga mampu meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas “masyarakat kampus” dalam memahami pergulatan pemikiran SEP dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Kontribusi, dengan memberikan sumbangan gagasan dan pemikiran tersebut sangat perlu, mengingat SEP tidak sekadar memiliki otentikitas sebagai gagasan yang khas Indonesia atau “sistem ekonomi tersendiri”, tetapi juga memiliki relevansi dengan persoalan-persoalan aktual perekonomian

nasional dewasa ini dan pada masa mendatang, terutama dalam mengatasi berbagai masalah kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 dan selanjutnya.

Kendati pun buku ini “belum sampai” mengonseptualisasikan ekonomi Pancasila sebagai disiplin ilmu tersendiri, namun diharapkan di masa mendatang -dimulai dengan “membaca ulang” pelacakan historis dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu- akan sampai pada tahapan tersebut. Karena itu, penulisan buku ini menggunakan pendekatan filsafat ilmu pengetahuan yang dimulai dengan membahas ontologi, dilanjutkan dengan epistemologi, dan aksiologinya (Rahardjo, 2004), dengan menggunakan kajian induktif dan deduktif sebagai berikut ini.

Pertama, pembahasan ontologi akan menjelaskan tentang asal-usul SDP dan SEP yang bersumber dari *filsafat etnik Nusantara*-dengan mengungkapkan hakikat manusia Indonesia yang merupakan subyek dari SDP dan SEP. Dalam pergaulan sosial kemudian, hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, berkembang menjadi paham kekeluargaan yang selanjutnya digali dan dirumuskan melalui metode integral sebagai falsafah dan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana paham kekeluargaan tersebut berkembang menjadi paham kebangsaan yang melahirkan kesadaran suku-suku bangsa di Nusantara untuk bersatu menjadi sebuah bangsa, yang pada saat itu masih terjajah dan tertindas, sehingga dapat memproklamasikan kemerdekaannya dan membentuk NKRI yang bersifat kekeluargaan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dasar Pancasila kemudian akan dijelaskan sistem ketatanegaraan NKRI yaitu Sistem Demokrasi Pancasila (SDP) yang akan menjadi landasan penalaran konsepsi SEP.

Kedua, pembahasan epistemologi SEP, yang berusaha menjawab pertanyaan apakah SEP dan bagaimana cara kerjanya. Penuliskannya diawali dengan memaparkan pandangan dan pemikiran para pakar dan ahli ekonomi yang telah menyampaikan pemikiran tentang SEP,

seperti: Bung Hatta, Wilopo, Emil Salim dan Profesor Mubyarto. Selanjutnya buku ini akan mengungkapkan, prinsip dasar dan ciri-ciri SEP sebagai suatu sistem ekonomi yang menjadi landasan perumusan UUD 1945 di bidang ekonomi serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Sistem Politik Pancasila (SPP) dan bersumber pada Sistem Demokrasi Pancasila (SDP).

Ketiga, pembahasan sisi aksiologi yang mempertanyakan kegunaan SEP bagi rakyat Indonesia. Dalam buku ini, kegunaan SEP diawali dengan menguraikan bagaimana konsep SEP digunakan sebagai tujuan, sasaran, dan desain pembangunan ekonomi nasional yang akan menjadi bahan perumusan GBHN.

Dengan pendekatan tersebut, bagi kalangan akademisi buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi dan karya intelektual, tetapi juga menjadi materi ajar di perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Selain itu, juga diharapkan memberikan rangsangan berpikir bagi mereka yang berminat mengembangkan ilmu ekonomi yang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila.

Sejalan dengan pendekatan penulisannya, buku ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu (1) Bagian 1 membahas asal-usul SEP; (2) Bagian 2 membahas tentang penalaran SEP yang merupakan Sistem Ekonomi NKRI, sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945, dan, (3) Bagian 3 menjelaskan arah dan haluan kebijakan penerapan pembangunan ekonomi nasional sebagai pengamalan Pancasila.

